



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANTOSO BUDI WIDIARTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 203655

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/77 m² di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/70 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG TS AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 179.243.594

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.077.243.594

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.077.243.594

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.